



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2026

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

Jl Pahlawan Km.5 Kajen

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 5 (lima) tahun.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan program kerja untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

Pada tahun 2026 selain mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan berjalan juga merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungan.

Renja Perubahan Tahun 2026 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dapat tercapainya kegiatan yang telah ditetapkan.

Renja sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun anggaran 2026 serta untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Renja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kajen, 2 Juni 2026

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



Dra. SITI MASRUROH, M.Si
Rembina Utama Muda
NIP. 19680906 199302 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
I.1 Latar Belakang	3
I.2 Landasan Hukum	4
I.3 Maksud dan Tujuan	8
I.4 Sistematika	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKER TAHUN LALU LALU	10
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bidang Koperasi, UKM dan Naker Tahun 2025 dan Capaian Renstra	10
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Naker.	21
II.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	23
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	41
III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Naker	41
III.2 Program dan Kegiatan 2026	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	43
Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran 2026	43
BAB V PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai pengusulan program dan kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program serta indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan,

keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Sedangkan prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan agar kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan dapat dipastikan.

Rencana Kerja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun dalam rangka membantu Bupati Pekalongan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Visi Bupati Pekalongan Periode 2025-2029 adalah “Kabupaten Pekalongan Maju, Adil, Dan Sejahtera”, sedangkan Misi yang diemban oleh Dinkop UKM dan Naker adalah mewujudkan Misi yang ke-3 yaitu: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Umkm Yang Berdaya Saing.

Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 tahun ke depan pada awal masa Jabatan Bupati Periode 2025-2029, sasaran yang ditetapkan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan adalah “Meningkatnya Koperasi Aktif, Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan”.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJPD 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);

- r. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- s. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA pelaksanaan kegiatan Dinkop UKM dan Naker tahun 2026 dalam mencapai target kinerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 antara lain adalah:

1. Perubahan arahan penyusunan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026,
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan.

I.4. SISTEMATIKA

Sistematika Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKER TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker tahun 2025 dan capaian Renstra,

memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra Dinkop UKM dan Naker berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinkop UKM dan Naker,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinkop UKM dan Naker,

Berisikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan.

II.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD,

Berisikan uraian mengenai proses dan penjelasan mengenai membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan serta penjelasan kegiatan dan proses tersebut.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

Berisikan mengenai uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada Bupati.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

III.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker, didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkop UKM dan Naker yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

III.2. Program dan Kegiatan,

berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kondisi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana kegiatan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIDANG KOPERASI, UKM DAN NAKER TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKER.

Rencana Kerja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan sebagai dokumen jangka menengah SKPD.

Kualitas penyusunan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah khususnya di bidang pelayanan masyarakat, pembinaan UKM, Pembinaan Koperasi serta BLK swasta maupun pencari kerja secara *online*, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan saat ini.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu evaluasi Renja bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian kinerja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2025 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja. Adapun capaian keuangan pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 11.156.264.885.

Mendapatkan anggaran APBD dan DAK Non Fisik sebesar Rp.11.967.145.801 yang bersumber dari dana APBD dan DAK Non Fisik Adapun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp.11.156.264.885, Anggaran belanja langsung digunakan untuk membiayai 10 Program dengan 36 sub kegiatan.

Adapun capaian keuangan pelaksanaan program/kegiatan Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BIDANG KOPERASI

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- 1) Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.538.000.

b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- 1) Peningkatan Produktivitas nilai tambah, akses Pasar, Akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi dan Rekturisasi usaha dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 857.400.500.

BIDANG UMKM

a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

- 1) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 650.044.800.
- 2) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 177.326.700,00.
- 3) Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 533.893.200.
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro dengan realisasi anggaran sebesar Rp.346.386.214.

b. Program Pengembangan UMKM

- 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan realisasi anggaran sebesar Rp.281.425.000.
- 2) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.131.546.950.

BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI.

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.437.500.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.567.521.985.
- 2) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.240.150.
- 3) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.532.200.
- 4) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.307.800.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

- 1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000.
- 2) Job Fair/Bursa Kerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp.66.800.900.
- 3) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.458.800.

d. Program Hubungan Industrial

- 1) Pengesahan Perusahaan bagi Perusahaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.082.450

- 2) Penyelenggaraan Pendataan dan informasi Sarana Hubungan Kerja dan Jaminan Sosial tenaga Kerja serta pengupahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.827.000,
- 3) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.097.200
- 4) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kab/Kota, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.789.000

e. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.077.830.

SEKRETARIAT

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.613.100.
- 2) Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.321.700.
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.222.047.028.
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.920.000.
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000.
- 6) Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penegrangan Bangunan kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.994.000.
- 7) Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.318.700.
- 8) Penyediaan Peralatan rumah tangga dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 29.249.360.

- 9) Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.548.800.
- 10) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.791.200.
- 11) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.492.069.
- 12) Penataan Arsip Dinamis pada SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.275.520.
- 13) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 182.633.468.
- 14) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.010.210.348.
- 15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.265.500.
- 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.893.113.
- 17) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.729.400.
- 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 173.329.000.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program/kegiatan Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang direncanakan dan dilaksanakan

memenuhi target kinerja yang telah diprogramkan.

- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antaralain:
 - 1. Penyusunan rencana kerja yang baik dalam menentukan program/kegiatan sehingga dapat dilaksanakan dan hasilnya sesuai target kinerja keluaran;
 - 2. Indikator/sasaran kinerja dipetakan berdasarkan analisis sesuai dengan norma dan standar;
 - 3. Pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya yang ada secara menyeluruh, efektif dan efisien.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu langkah-langkah yang diambil antara lain melakukan perubahan terhadap yang sudah ditetapkan.
- d. Perkiraan capaian target kinerja program/kegiatan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun anggaran berjalan yakni tahun 2026 adalah 94,45 %.

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2025 dan rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2025 ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Realisasi Pelaksanaan Renja
Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output 2025	Realisasi Output	Capaian Output (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dians Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja						11.967.145.801	11.156.264.885	93,22
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	100	42.586.700	41.538.000	97,53
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		50 Koperasi	50 Koperasi	100	42.586.700	41.538.000	97,53
1.1.1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Koperasi	50 Koperasi	100	42.586.700	41.538.000	97,53
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	50 Koperasi	50 Koperasi	100	857.947.540	857.400.500	99,93
2.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		50 Koperasi	50 Koperasi	100	857.947.540	857.400.500	99,93

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output 2025	Realisasi Output	Capaian Output (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 Koperasi	50 Koperasi	100	857.947.540	857.400.500	99,93
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha				1.737.187.171	1.707.650.914	98,30
3.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					1.737.187.171	1.707.650.914	98,30
3.1.1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	250 unit usaha	294 unit usaha	117%	678.554.800	650.044.800	95,79
3.1.2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	415 unit usaha	470 unit usaha	113%	177.469.700	177.326.700	99,91
3.1.3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap	140 unit usaha	280 unit usaha	200%	534.774.500	533.893.200	99,83

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output 2025	Realisasi Output	Capaian Output (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Usaha Mikro						
3.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	140 unit usaha	280 unit usaha	200%	346.388.171	346.386.214	99,99
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					415.102.150	412.971.950	99,48
4.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					415.102.150	412.971.950	99,48
4.1.1	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	385 unit usaha	461 unit usaha	119%	283.555.200	281.425.000	99,24
4.1.2	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	80 unit usaha	230 unit usaha	287%	131.546.950	131.546.950	100
5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				23.564.500	23.437.500	99,46
5.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	23.564.500	23.437.500	99,46
5.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	23.564.500	23.437.500	99,46
6	PROGRAM PELATIHAN	- Persentase Tenaga Kerja	30%	30,4%	101,3%	1.664.981.120	1.613.602.135	96,91

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output 2025	Realisasi Output	Capaian Output (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Bersertifikat kompetensi - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	52,61%	51,52 %	98 %			
6.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					1.634.140.150	1.582.762.135	96,85
6.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	288	304	105%	1.618.600.000	1.567.521.985	96,84
6.1.2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun	16 Orang	16 Orang	100 %	15.540.150	15.240.150	98,06
6.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					10.533.080	10.532.200	99,99
6.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	28 LPKS	28 LPKS	100 %	10.533.080	10.532.200	99,99
6.3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					20.307.890	20.307.800	99,99
6.3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	16 Perusahaan	16 Perusahaan	100 %	20.307.890	20.307.800	99,99
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)				99.537.120	99.259.700	99,72
7.1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					92.078.320	91.800.900	99,69

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output 2025	Realisasi Output	Capaian Output (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	3500 Pencaker	5290 Pencaker	152 %	25.000.000	25.000.000	100
7.1.2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online	300 Pencaker	314 Pencaker	104 %	67.078.320	66.800.900	99,58
7.2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50 Orang	217 Orang	434 %	7.458.800	7.458.800	100
7.2.1	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50 Orang	217 Orang	434 %	7.458.800	7.458.800	100
8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 	779 Orang 74 Perusahaan	777 Orang 74 Perusahaan	99,74 % 100%	316.145.650	289.494.050	91,56
8.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					21.909.450	21.909.450	100
8.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	100 %	10.082.450	10.082.450	100

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output 2025	Realisasi Output	Capaian Output (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB						
8.1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Perusahaan	6 Perusahaan	100 %	11.827.000	11.827.000	100
8.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					294.236.200	267.584.600	90,94
8.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan	60 Perusahaan	60 Perusahaan	100 %	113.447.200	113.097.200	99,69
8.2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 Perusahaan	60 Perusahaan	100 %	10.789.000	10.789.000	100
8.2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga	779 Orang	777 Orang	99,74 %	170.000.000	143.698.400	84,52

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output 2025	Realisasi Output	Capaian Output (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	1 KK	1 KK	100 %	72.977.830	72.077.830	98,76
9.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					72.977.830	72.077.830	98,76
9.1.1	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	25 Orang	25 Orang	100%	72.977.830	72.077.830	98,76
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.737.116.020	6.038.832.306	89,55
10.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.934.860	10.934.800	100
10.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bln laporan	12 bln laporan	100%	5.321.700	5.321.700	100
10.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12 bln laporan	12 bln laporan	100%	5.613.160	5.613.100	99,99
10.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.873.802.880	4.304.967.028	88,32
10.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan Orang/bulan	14 bulan Orang/bulan	100%	4.789.846.000	4.222.047.028	88,14
10.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen Dokumen	12 dokumen Dokumen	100%	83.956.880	82.920.000	98,76

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output 2025	Realisasi Output	Capaian Output (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.518.000	2.200.000	48,69
10.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	20 orang	100%	4.518.000	2.200.000	48,69
10.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					218.881.200	211.669.649	96,70
10.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	9.994.000	9.994.000	100
10.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	12 bulan Paket	100%	53.518.840	52.318.700	97,75
10.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan paket	12 bulan paket	100%	30.000.000	29.249.360	97,49
10.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan paket	12 bulan paket	100%	74.648.800	71.548.800	95,84
10.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan laporan	12 bulan laporan	100%	5.791.440	5.791.200	99,99
10.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan laporan	12 bulan laporan	100%	41.652.600	39.492.069	94,81
10.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan laporan	12 bulan laporan	100%	3.275.520	3.275.520	100

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Output 2025	Realisasi Output	Capaian Output (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.303.625.000	1.192.843.816	91,50
10.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 paket	12 paket	100%	186.625.000	182.633.468	97,86
10.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1.117.000.000	1.010.210.348	90,43
10.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					325.354.080	316.217.013	97,19
10.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan unit	12 Bulan unit	100%	34.995.200	33.265.500	95,05
10.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	100%	59.997.400	55.893.113	93,15
10.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	100%	54.961.480	53.729.400	97,75
10.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Bulan Unit	5 Bulan Unit	100%	175.400.000	173.329.000	98,81

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa dari 10 Program 19 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan tersebut, terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang ditetapkan pada Rancangan Awal Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2025 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINKOP UKM DAN NAKER

Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pekalongan. Pengawasan Intern tersebut meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam Draft Renstra Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 menetapkan 5 (Lima) sasaran yang ingin dicapai dan dijabarkan dalam program sebagai berikut:

- 1) Program Pemerintah Bidang Koperasi
- 2) Program Pemerintah Bidang UMKM
- 3) Program Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
- 4) Program Pemerintah Bidang Transmigrasi
- 5) Program Pemerintah Bidang Pilihan

Kinerja pelayanan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 yang telah diusulkan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Secara umum pelayanan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan menunjukkan kinerja yang cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2026.

Tabel 2.2**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan**

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
1	Jumlah Pemberdayaa n melalui kemitraan usaha mikro		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (IKK)	20,00		
2	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)	100	100	Jumlah Dokumen yang dihasilkan
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK)	30,00	30,40	
4	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (IKK)	40,41	51,52	
5	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	20,22	34,16	Jumlah pendaftar kerja pada Job Fair (919) dibagi Jumlah tenaga kerja (314) yang ditempatkan

6	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK)	100	100	Jumlah Perusahaan
---	---	--	--	-----	-----	-------------------

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINKOP UKM DAN NAKER

Proses reformasi didalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan yaitu:

a. Tugas pokok dan fungsi Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdsarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada pasal 386 Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Naker mempunyai fungsi:

- 1) Perumus kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- 2) Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, UKM dan Naker.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi, UKM dan Naker.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, UKM dan Naker.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

- 6) Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Naker mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan fungsi di sekretariat.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksanaan Kegiatan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelaksanaan kegiatan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, yaitu:

- 1) Jumlah tenaga ASN dimasing-masig bidang masih belum mencukupi sesuai standar Dinas yang terdiri dari 3 Bidang, 1 UPT dan Sekretraiat.
- 2) Jumlah anggaran dalam tiap Tahun Anggaran belum mencukupi sehingga program yang terjangkau sangat terbatas belum bisa memenuhi permintaan dari masyarakat yang menginginkan kegiatan pelatihan diperbanyak.

Kondisi Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan. Lingkungan internal dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).

Kondisi Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan. Lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*).

Isu-Isu strategis yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang pada Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan sbb:

1. Belum optimalnya Kesempatan kerja yang didukung oleh kompetensi pekerja sesuai dengan keahliannya.
2. Belum optimalnya kesempatan kerja dari pencari kerja yang ada.
3. Rendahnya Koperasi berkualitas di Kabupaten Pekalongan.
4. Belum optimalnya peran dan partisipasi UKM Binaan dalam mendorong Perekonomian daerah.

Untuk penanganan isu-isu tersebut telah dilaksanakan Langkah-langkah sbb:

1. Memperbanyak kegiatan dibidang pelatihan yang saat ini dibutuhkan didunia kerja yang berbasis kompetensi,
2. Membuka peluang lowongan kerja dengan perusahaan melalui Job Fair,
3. Melakukan pengawasan dan sosialisasi secara intensif ke Koperasi-Koperasi yang dikatagorikan kurang sehat, koperasi yang sehat ditandai dengan RAT tiap Tahunnya,
4. Masih banyaknya para wirausaha baru yang kita latih meliputi pelatihan, kewirausahaan baru, pemasaran/marketing, kemasan produk dan aneka macam produk.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 disusun dengan menyesuaikan rancangan awal RKPD Kabupaten

Pekalongan Tahun 2026. Perubahan beberapa kegiatan bertujuan untuk mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan skala prioritas pembangunan tahun 2026. Selain itu perubahan program/kegiatan maupun pagu indikatif dilakukan setelah melakukan identifikasi permasalahan, analisis kinerja pelayanan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan berupa Pelatihan dan informasi pencari kerja baru serta pembinaan koperasi dan Balai Latihan Kerja Swasta.

Setelah melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD, membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang telah dicapai Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan, serta sesuai arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD dan terbitnya aturan yang baru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Nomenklatur Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang mengalami perubahan adalah sesuai dengan Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koeparsi UKM dan Naker

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Kab. pekalongan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 koperasi	Rp. 50.450.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah	kab. pekalongan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 koperasi	Rp. 177.493.513	

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota					Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya			
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota					Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.	Kab. pekalongan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 koperasi	Rp. 78.940.540	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.	Kab. pekalongan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 koperasi	Rp. 47.927.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO		Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA		Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha			

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(UMKM)					MIKRO (UMKM)					
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. pekalongan	Jumlah Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	250 Unit Usaha	Rp. 72.650.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. pekalongan	Jumlah Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	250 Unit Usaha	Rp. 72.650.000	
	Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro	Kab. pekalongan	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	415 Unit Usaha	Rp. 24.550.000	Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro	Kab. pekalongan	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	415 Unit Usaha	Rp. 24.550.000	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	Kab. pekalongan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	215 Unit Usaha	Rp. 377.400.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Kab. pekalongan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	215 Unit Usaha	Rp. 377.400.000	

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Usaha Mikro		Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			Pengembangan Usaha Mikro		Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			
	Koodinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Pekalongan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	140 Orang	Rp. 293.471.343	Koodinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Pekalongan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	140 Orang	Rp. 293.471.343	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya			
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
	Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pekalongan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	215 Unit Usaha	Rp. 24.600.000	Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pekalongan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	215 Unit Usaha	Rp. 24.600.000	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pekalongan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan,	80 Unit Usaha	Rp. 133.336.950	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta	Kab. Pekalongan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	80 Unit Usaha	Rp. 133.336.950	

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			Desain dan Teknologi		Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)			
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Rp. 16.660.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Rp. 15.827.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	31 %		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	31 %		
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40,52 %				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40,52 %		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	288 Orang	Rp. 890.325.200	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	288 Orang	Rp. 889.395.200	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	288 Orang	Rp. 39.305.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	288 Orang	Rp. 37.339.750	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	43 Lembaga	Rp. 25.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	43 Lembaga	Rp. 23.750.000	
	Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil					Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil					
	Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	Rp. 23.675.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	Rp. 22.491.250	

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	20,44 %		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	20,44 %		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Pekalongan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	Rp. 64.720.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Pekalongan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	Rp. 61.484.000	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Pekalongan	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online	75 Orang	Rp. 82.210.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Pekalongan	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online	75 Orang	Rp. 74.194.525	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. pekalongan	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	35 Orang	Rp. 15.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. pekalongan	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	35 Orang	Rp. 14.250.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 %		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 %		
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. pekalongan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB	10 Perusahaan	Rp. 15.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. pekalongan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB	10 Perusahaan	Rp. 14.250.000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. pekalongan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Perusahaan	Rp. 19.350.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. pekalongan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Perusahaan	Rp. 39.350.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Kab. pekalongan	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan	10 Perkara	Rp19.750.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Kab. pekalongan	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan	10 Perkara	Rp. 18.762.500	

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. pekalongan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	Rp. 15.500.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. pekalongan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	Rp. 64.725.000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. pekalongan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1470 Orang	Rp. 405.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. pekalongan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1470 Orang	Rp. 405.000.000	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	100 %		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	100 %		
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal dari Satu (satu) Kabupaten/Kota	Kab. pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi	1 laporan	Rp. 83.974.000	Koordinasi dan Sinkronasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal dari Satu	Kab. pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Yang	1 laporan	Rp. 79.775.300	

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Yang Berasal dari Satu (satu) Kabupaten/Kota			(satu) Kabupaten/Kota		Berasal dari Satu (satu) Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp. 5.613.160	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp. 5.613.160	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	Rp. 7.321.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	Rp. 7.321.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	Rp. 4.708.471.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	Rp. 4.568.471.000	

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp. 90.956.880	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp. 90.956.880	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pekalongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Rp. 10.518.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pekalongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Rp. 9.992.100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 11.994.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 11.394.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp60.518.840	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 79.441.698	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan Paket	Rp. 35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan Paket	Rp. 33.250.000	

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 84.648.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 62.148.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. pekalongan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp. 10.791.440	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. pekalongan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp. 10.251.868	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp. 59.575.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp. 56.596.250	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp. 8.275.520	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp. 8.019.844	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 255.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 255.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 1.225.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 1.225.000.000	

No.	DPA PENETAPAN TAHUN 2026					DPA PERUBAHAN TAHUN 2026					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp. 44.995.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp. 47.495.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. pekalongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Rp. 79.997.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. pekalongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Rp. 75.997.530	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Rp. 54.961.480	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Rp. 52.213.406	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp. 472.050.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp. 448.447.500	

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan dalam menetapkan program dan kegiatan memperhatikan usulan-usulan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan mandatori dari perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, dan lain-lain. Namun, karena banyaknya mandatori yang tidak dapat seluruhnya dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya, maka Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan menggunakan usulan perencanaan yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pekalongan

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kab. Pekalongan	Persentase fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	100 %	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	

	Keanggotaan				
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Pekalongan	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	100 %	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha	
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Pekalongan	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pekalongan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

III.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN DINKOP UKM DAN NAKER

Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 mengacu pada Renstra Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.

- a. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 yaitu:

“Kabupaten Pekalongan Maju, Adil, dan Sejahtera”

- b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan.
2. Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UMKM yang Berdaya Saing.
4. Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani.

Dalam rangka membantu Bupati Pekalongan dalam mewujudkan Visi dan Misi 3 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UMKM yang Berdaya Saing, maka Dinkop UKM dan Naker berupaya untuk mencapai tujuan adalah “Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan

Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek.

III.2. PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2026 sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan rumusan program/kegiatan/subkegiatan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Perubahan Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program/kerja Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 merupakan pedoman penyusunan RKA pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 dalam mencapai target kinerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi;
- b. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebanyak 10 program terdiri dari 19 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Jumlah dana/pagu indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 sesuai dengan RKPD Perubahan Tahun 2026 total sebesar Rp 9.959.635.067.

Dalam Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 diproyeksikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. **Belanja Operasional terdiri dari:**

1. Belanja Kegiatan : Rp. 5.391.164.067,-
2. Belanja Gaji dan Tunjangan : Rp. 4.568.471.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN

IV.1. RENCANA KERJA DAN ALOKASI ANGGARAN

Pada Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 9.959.635.067.

Rincian anggaran di Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Perubahan Alokasi Anggaran APBD
Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2026		Pagu Indikatif 2026	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi				
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 koperasi	50 koperasi	Rp. 50.450.000	Rp. 177.493.513
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya				
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 koperasi	50 koperasi	Rp. 78.940.540	Rp. 47.927.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2026		Pagu Indikatif 2026	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	Rp. 72.650.000	Rp. 72.650.000
	Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	415 Unit Usaha	415 Unit Usaha	Rp. 24.550.000	Rp. 24.550.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	215 Unit Usaha	215 Unit Usaha	Rp. 377.400.000	Rp 377.400.000
	Koodinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	140 Orang	140 Orang	Rp. 293.471.343	Rp. 293.471.343
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	215 Unit Usaha	215 Unit Usaha	Rp. 24.600.000	Rp. 24.600.000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	Rp. 133.336.950	Rp 133.336.950
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	100 %		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)				
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 16.660.000	Rp. 15.827.000

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2026		Pagu Indikatif 2026	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	31 %	31 %		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40,52 %	40,52 %		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	288 Orang	288 Orang	Rp. 890.325.200	Rp. 889.395.200
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	288 Orang	288 Orang	Rp. 39.305.000	Rp. 37.339.750
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	43 Lembaga	43 Lembaga	Rp. 25.000.000	Rp. 23.750.000
	Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil					
	Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Rp. 23.675.000	Rp. 22.491.250
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	20,44 %	20,44 %		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1000 Orang	Rp. 64.720.000	Rp. 61.484.000
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online	75 Orang	75 Orang	Rp. 82.210.000	Rp. 74.194.525
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI	35 Orang	35 Orang	Rp. 15.000.000	Rp. 14.250.000

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2026		Pagu Indikatif 2026	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
		Bermasalah yang Ditangani				
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 %	100 %		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %	100 %		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Rp. 15.000.000	Rp. 14.250.000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Rp. 19.350.000	Rp. 39.350.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan	10 Perkara	10 Perkara	Rp19.750.000	Rp. 18.762.500
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	2 Lembaga	Rp. 15.500.000	Rp. 64.725.000

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2026		Pagu Indikatif 2026	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	Kabupaten/Kota					
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1470 Orang	1470 Orang	Rp. 405.000.000	Rp. 405.000.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	100 %	100 %		
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal dari Satu (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal dari Satu (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	Rp. 83.974.000	Rp. 79.775.300
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp. 5.613.160	Rp. 5.613.160
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	Rp. 7.321.700	Rp. 7.321.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	40 orang/bulan	Rp. 4.708.471.000	Rp. 4.568.471.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp. 90.956.880	Rp. 90.956.880
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	10 Orang	10 Orang	Rp. 10.518.000	Rp. 9.992.100

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2026		Pagu Indikatif 2026	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 11.994.000	Rp. 11.394.300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp60.518.840	Rp. 79.441.698
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan Paket	12 bulan Paket	Rp. 35.000.000	Rp. 33.250.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 84.648.800	Rp. 62.148.800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	Rp. 10.791.440	Rp. 10.251.868
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 59.575.000	Rp. 56.596.250
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp. 8.275.520	Rp. 8.019.844
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 255.000.000	Rp. 255.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 1.225.000.000	Rp. 1.225.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Rp. 44.995.200	Rp. 47.495.200

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2026		Pagu Indikatif 2026	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	Rp. 79.997.400	Rp. 75.997.530
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Rp. 54.961.480	Rp. 52.213.406
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Rp. 472.050.000	Rp. 448.447.500

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkop UKM dan Naker serta berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan.

Untuk melaksanakan Rencana Kerja Perubahan ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinkop UKM dan Naker karena akan sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, diharapkan Rencana Kerja Perubahan ini bukanlah hanya sebagai dokumen administrasi saja, namun dilaksanakan secara substansial yang merupakan cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan dalam pencapaian visi dan misi Pimpinan Daerah.

Disamping itu Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 serta memberikan manfaat bagi proses pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Tahun 2026 disusun terukur dengan berpedoman pada arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 dan Renstra Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.

3. Unsur teknis pelaksana kerja pada Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Kajen, 2 Juni 2026

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



Dra. SITI MASRUOH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680906 199302 2 003